

BAHASA INDONESIA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI EFEKTIF BAGI APARAT HUKUM

Evelyn Alya Ramadhani¹, Wa Ode Nasylla Endang Rahmadani², Ramos Titius Yustus
Alexander Nanaban³ Exellyana Rahmadani Damayanti⁴, Muhammad Fauzan Arjuna⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email: alyaelin743@gmail.com¹, nawaode@gmail.com², Ramosalexander558@gmail.com³,
dama.exelly70@gmail.com⁴, fauzanarjuna2006@gmail.com⁵

ABSTRAK

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pemurnian seiring berjalannya waktu, menjadi alat komunikasi yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum. Dalam konteks hukum, Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia digunakan dalam perundang-undangan. komunikasi memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena setiap individu memerlukan kemampuan berkomunikasi sepanjang hidupnya komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak hanya diterima tetapi juga dipahami secara tepat oleh penerimanya. Bahasa Indonesia yang efektif berpengaruh besar terhadap keadilan dalam sistem hukum pelatihan dan pengembangan keterampilan bahasa bagi aparat hukum menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Komunikasi, Hukum

ABSTRACT

Indonesian is the national language and state language of the Republic of Indonesia. Indonesian continues to develop and refine over time, becoming an effective communication tool in various fields of life, including law. In the context of law, Indonesian has a very strategic role. As the official language of the state, Indonesian is used in legislation. communication has a very basic role in human life, because every individual needs the ability to communicate throughout his life Effective communication occurs when the message conveyed is not only received but also appropriately understood by the recipient. effective Indonesian has a major effect on justice in the legal system. training and development of language skills for legal officers is very important..

Keywords: Indonesian language, Communication, Law

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Argopuro



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara Republik Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Lahir dari beragam bahasa daerah yang ada di Nusantara, Bahasa Indonesia dibentuk dengan tujuan mempersatukan bangsa yang majemuk. Bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pemurnian seiring berjalannya waktu, menjadi alat komunikasi yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum. sebagai bahasa resmi negara, memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum, keterampilan berbahasa

Indonesia yang baik dan benar menjadi faktor yang sangat penting. Para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, sering kali terlibat dalam pembuatan dan penafsiran dokumen hukum, penyusunan argumen, serta komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait.

Dalam konteks hukum, Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia digunakan dalam perundang-undangan: semua peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun dalam Bahasa Indonesia. Putusan pengadilan: Putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi menggunakan Bahasa Indonesia. Menguasai Bahasa Indonesia dengan baik sangat penting bagi para ahli hukum. Hal ini karena ketepatan makna bahasa hukum sering kali menggunakan istilah-istilah yang spesifik dan memiliki makna yang sangat ketat. Kesalahandalam memahami atau menggunakan istilah hukum dapat berakibat fatal.

Komunikasi yang jelas dan tepat sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan. Ketidakakuratan atau ambiguitas dalam penggunaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil keputusan hukum dan menimbulkan dampak negatif pada hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa Indonesia yang tinggi menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sering kali terdapat masalah terkait penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam dokumen hukum maupun komunikasi hukum sehari-hari. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya standar bahasa hukum yang baku dan jelas. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan para penegak hukum.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pentingnya keterampilan berbahasa Indonesia bagi para penegak hukum dan mengeksplorasi implikasi dari penggunaan bahasa yang kurang efektif dalam praktik hukum. Dengan memahami peran bahasa dalam sistem peradilan, diharapkan akan ditemukan solusi untuk meningkatkan Indonesia.

LANDASAN TEORI PENGERTIAN KOMUNIKASI

Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang diinisiasi oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Terjadinya komunikasi merupakan hasil dari adanya hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena setiap individu memerlukan kemampuan berkomunikasi sepanjang hidupnya. Menurut Hovland, Jains, dan Kelly Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (yang biasanya bentuk kata-kata) yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak.

Komunikasi didefinisikan sebagai proses pertukaran yang memfasilitasi berbagi informasi antara individu atau kelompok. Schramm (1954) menjelaskan bahwa komunikasi terkait dengan berbagai bentuk, saluran, penerima, pesan, dan umpan balik. Dalam konteks aparat hukum, proses komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa informasi hukum tersaji dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat umum.

Komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak hanya diterima tetapi juga

dipahami secara tepat oleh penerimanya. Wilbur Schramm menekankan pentingnya konteks dan nada dalam komunikasi. Di bidang hukum, penggunaan bahasa Indonesia yang akurat dan fasih sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan memastikan semua pihak terlibat dalam dialog yang konstruktif.

1. **Bahasa sebagai Alat Komunikasi** Selain sebagai instrumen komunikasi, bahasa juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat, budaya, dan identitas. Menurut Sapir (1921), bahasa merupakan sarana ekspresi dan pemahaman dunia bagi sekelompok orang tertentu. Dalam konteks hukum, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi harus digunakan secara konsisten untuk menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses dan memahami norma dan peraturan hukum.

Menciptakan Keadilan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Hymes (1972) menegaskan bahwa penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks tertentu sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini sangat relevan dengan konferensi, karena kejelasan bahasa dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat merugikan suatu organisasi.

2. Bahasa Indonesia dalam konteks hukum

Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penggunaan bahasa nyata dalam dokumen hukum, korespondensi bisnis, dan komunikasi antar organisasi sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kejelasan informasi. Hal ini akan membantu mengurangi ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan dan prosedur hukum.

Memahami istilah-istilah yang digunakan dalam hukum Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi ambiguitas dan kesalahpahaman di seluruh proses hukum. Menurut Sudaryanto (1993), teks hukum yang jelas dan ringkas dapat membantu sistem hukum dalam menyampaikan informasi hukum yang kompleks kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami.

3. Praktek Komunikasi Manusia

Komunikasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian Brown dan Levinson (1987) menunjukkan bahwa pesan yang tepat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakjelasan atau penggunaan bahasa yang sulit dipahami dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Penting bagi para profesional hukum untuk mendapatkan pelatihan bahasa guna meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Nunan (1991) menegaskan bahwa keterampilan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efektivitas seseorang dalam dunia profesional, termasuk bidang hukum. Program pelatihan komunikasi yang efektif harus mencakup terminologi hukum dan keterampilan percakapan umum sehingga pengetahuan hukum dapat diungkapkan dengan jelas dan ringkas.

4. Pembelajaran Bahasa Bahasa yang Efektif

Penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami membantu masyarakat umum dalam mengakses informasi hukum. Hal ini membantu pendidikan hukum masyarakat umum dan meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak mereka sendiri. Masyarakat yang lebih berpendidikan akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses hukum.

Komunikasi yang jelas dan efektif dapat mengurangi konflik antara sistem hukum dan masyarakat umum. Ketika informasi hukum dikomunikasikan dengan cara yang tidak transparan, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan

pemahaman dari yang kami teliti terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian deskriptif menuntut penulis untuk mengamati latar dari hasil yang diteliti. Sugiyono (2013:9) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi yang di mana pengumpulan data ini kami melakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini berguna untuk memperoleh data yang sudah ada, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana pemahaman mendalam tentang konteks dan sejarah suatu masalah sangat dibutuhkan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi diharuskan untuk menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya. Sehingga dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi (Arikunto, 2007 : 291).

3. Hasil yang Diharapkan

a. Pemahaman yang Lebih Baik: diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran Bahasa Indonesia dalam komunikasi hukum dan tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum.

b. Rekomendasi untuk pelatihan: hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program pelatihan bahasa yang lebih efektif bagi aparat hukum, guna meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dengan masyarakat.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan akan tercipta wawasan baru mengenai pentingnya Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum, komunikasi yang efektif sangat penting bagi aparat hukum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara, memiliki peran sentral dalam membangun komunikasi yang jelas, terstruktur, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meminimalkan konflik yang mungkin muncul akibat interpretasi yang berbeda terhadap teks hukum. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks hukum yang sering kali melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat mempengaruhi hak serta kewajiban individu.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media utama dalam penyampaian informasi hukum, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun dokumen hukum lainnya. Kejelasan bahasa dalam dokumen hukum sangat penting agar semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, dapat memahami isi dan implikasi dari hukum yang berlaku. Dokumen yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan ringkas tidak hanya memudahkan pemahaman, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong budaya hukum yang lebih baik.

Kemampuan berbahasa yang baik di kalangan aparat hukum sangat krusial, karena mereka harus mampu mengkomunikasikan informasi hukum dengan cara yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Di sini, pelatihan dan pengembangan keterampilan bahasa bagi aparat hukum menjadi sangat penting. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang istilah-istilah hukum dalam Bahasa Indonesia juga diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Penggunaan istilah yang tepat dan mudah dipahami akan membantu mengurangi kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam situasi hukum yang kompleks.

Meskipun Bahasa Indonesia diakui sebagai alat komunikasi yang efektif, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keragaman bahasa dan dialek di Indonesia yang dapat menghambat pemahaman. Banyak istilah hukum yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum agar lebih mudah diakses. Penggunaan istilah yang kompleks tanpa penjelasan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan, yang berpotensi merugikan hak-hak individu

Beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, termasuk pelatihan bahasa bagi aparat hukum dan penyusunan dokumen hukum yang lebih sederhana. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti aplikasi atau platform digital yang menyediakan informasi hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, juga dapat menjadi solusi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi hukum dapat dijangkau oleh lebih banyak orang, sehingga memperluas pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka.

Penggunaan Bahasa Indonesia yang efektif berpengaruh besar terhadap keadilan dalam sistem hukum; ketika informasi disampaikan dengan jelas, masyarakat lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan melibatkan diri dalam proses hukum. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan ketidakpahaman yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan keterampilan bahasa dan penyederhanaan istilah hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Bahasa Indonesia, sebagai bahasa negara dan bahasa resmi, memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, bahasa yang jelas dan mudah dipahami akan mengurangi potensi terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan hukum, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak. Memudahkan komunikasi hukum, bahasa Indonesia yang baik akan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara aparat hukum, pelaku hukum, dan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien. Dengan saran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi aparat hukum. Kumpulan kamus hukum, pengembangan kamus hukum yang komprehensif dan mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami istilah-istilah hukum. Sosialisasi hukum, Perlu dilakukan sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dengan penggunaan yang tepat dan efektif, bahasa Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwanti, C. (2021). Eksistensi Bahasa dalam Hukum Negara. *Oratio Directa*, 14.
- Shanti, W. Y. (2016). Analisa Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Cakrawala Hukum*, 13.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *adil indonesia jurnal*, 15.